

## Pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH): Strategi Membangun Pusat Industri Halal Dunia

Azka Setya Wibowo

KSEI LiSEnSi UIN Jakarta

Article Info	ABSTRACT
<b>Article history:</b> Field Research (Juli)	Pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH) merupakan langkah strategis untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Meskipun memiliki potensi besar melalui pasar domestik yang luas dan ketersediaan bahan baku, implementasi KIH masih menghadapi kendala seperti minimnya investasi, lemahnya kolaborasi antar lembaga, serta belum optimalnya digitalisasi dalam proses sertifikasi dan pengawasan. Di tengah persaingan global dengan negara seperti Malaysia dan UEA yang telah memiliki ekosistem halal lebih mapan, Indonesia perlu memperkuat insentif investasi, meningkatkan sinergi multipihak, membangun pusat riset halal berbasis teknologi, serta memperkuat branding “Indonesia Halal Hub”. Dengan strategi yang terarah dan kolaboratif, Indonesia berpeluang besar memperkuat daya saing industri halal dan memperluas perannya dalam ekonomi syariah global.
<b>Keywords:</b> <i>Kawasan Industri Halal, Ekonomi Syariah, Digitalisasi Halal, Indonesia Halal Hub</i>	
<b>Editor:</b> Zahra Widad Salma Faculty of Economics and Business	

### PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pengembangan industri halal global. Dengan jumlah umat Islam yang mencapai lebih dari 240 juta jiwa, kebutuhan terhadap produk halal di dalam negeri sangat tinggi, dan hal ini memberikan posisi strategis Indonesia dalam pasar halal dunia. Untuk memanfaatkan potensi tersebut, pemerintah—melalui Kementerian Perindustrian—menginisiasi pembangunan Kawasan Industri Halal (KIH) sebagai salah satu strategi utama dalam mendukung ekonomi syariah nasional. Kawasan ini dirancang agar menjadi pusat kegiatan produksi, distribusi, sertifikasi, dan pengembangan teknologi produk halal secara menyeluruh dan keseluruhan. Hingga saat ini, terdapat tiga lokasi utama KIH yang sedang dikembangkan, yaitu:

1. KIH Cikande di Banten, yang menjadi pelopor kawasan halal di Indonesia.
2. KIH Batam di Kepulauan Riau, yang memiliki keunggulan geografis karena dekat dengan jalur perdagangan internasional.
3. KIH Karawang di Jawa Barat, yang berfokus pada pengembangan industri halal skala besar.

Meskipun program ini membawa harapan besar, namun pelaksanaannya masih menemui sejumlah kendala. Salah satu kendala utamanya adalah kurangnya minat investasi dari sektor swasta, yang disebabkan oleh minimnya insentif dan belum jelasnya potensi keuntungan. Selain itu, fasilitas pendukung seperti laboratorium pengujian halal, sistem distribusi sesuai standar halal, dan teknologi produksi yang modern masih perlu ditingkatkan. Kendala lainnya adalah lemahnya kerja sama antara sektor industri dan dunia pendidikan. Akibatnya, inovasi dan penelitian di bidang halal belum berkembang secara optimal. Hanya saja, penerapan teknologi digital dalam proses produksi dan pengawasan halal pun belum berjalan maksimal.

Di sisi lain, negara-negara seperti Malaysia, UEA, dan Turki sudah lebih dahulu membangun dan mempromosikan kawasan industri halal mereka. Malaysia, misalnya, telah mengembangkan Halal Park yang terintegrasi sejak awal tahun 2000-an dan dikenal luas dengan standar JAKIM-nya yang diakui secara internasional. Dubai pun telah memposisikan dirinya sebagai pusat ekonomi Islam melalui berbagai kebijakan yang progresif. Meski demikian, Indonesia tetap memiliki keunggulan yang tidak dimiliki negara lain, seperti pasar dalam negeri yang besar, ketersediaan bahan baku yang melimpah, serta dukungan masyarakat terhadap produk halal. Laporan State of the Global Islamic Economy 2023 memperkirakan bahwa nilai ekonomi halal global akan melebihi 3 triliun dolar AS pada tahun 2025. Ini mencakup berbagai sektor seperti makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, keuangan syariah, hingga pariwisata halal. Melihat peluang tersebut, pengembangan Kawasan Industri Halal harus menjadi fokus utama agar Indonesia dapat menjadi pemimpin dalam pasar halal global. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan kerja sama yang solid antara pemerintah, pelaku usaha, sejarawan, dan masyarakat. Dukungan kebijakan yang kuat serta penggunaan teknologi digital juga perlu dioptimalkan agar ekosistem halal nasional benar-benar mampu bersaing di tingkat internasional.

## PEMBAHASAN

Meskipun konsep Kawasan Industri Halal (KIH) merupakan strategi inisiatif dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam pasar halal dunia, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu kendala yang paling mencolok adalah terbatasnya pendanaan dari sektor swasta maupun publik. Minimnya investasi ini diperburuk oleh kurangnya insentif fiskal yang menarik bagi investor, sehingga pelaku usaha cenderung ragu untuk berkomitmen di sektor ini. Skema pembiayaan yang belum inovatif juga menyebabkan keterbatasan modal untuk mempercepat pembangunan infrastruktur halal yang memadai. Selain itu, permasalahan lainnya terletak pada lemahnya integrasi antara lembaga-lembaga yang berperan penting dalam ekosistem halal, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), lembaga pemeriksa halal (LPH), pelaku industri, dan lembaga akademik. Ketidakterhubungan antara pihak-pihak ini menghambat terciptanya kolaborasi yang bersinergi dalam pengembangan riset, inovasi, dan sumber daya manusia di bidang halal. Padahal, kemajuan industri halal sangat memerlukan dukungan ilmu pengetahuan, teknologi, serta tenaga profesional yang kompeten.

Isu lainnya adalah branding Indonesia sebagai pusat industri halal dunia yang masih lemah. Meskipun memiliki potensi pasar dan jumlah penduduk Muslim yang besar, citra Indonesia dalam industri halal global masih kalah dibandingkan negara-negara lain seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Turki. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya kampanye nasional dan internasional yang terstruktur untuk memperkenalkan Indonesia sebagai "Halal Global Hub". "Halal Global Hub" mengacu pada konsep atau tujuan menjadikan suatu negara atau wilayah sebagai pusat utama dalam industri halal dunia, baik dalam hal produksi, sertifikasi, distribusi, dan inovasi produk halal. Konsep ini bertujuan untuk membangun sebuah ekosistem halal yang komprehensif, yang melibatkan berbagai sektor industri, pemerintahan, lembaga sertifikasi, akademisi, dan masyarakat.

Di sisi lain, penggunaan teknologi digital dalam proses produksi dan sertifikasi halal juga belum berjalan optimal. Proses sertifikasi yang masih cenderung manual dan terbatasnya penggunaan sistem berbasis digital seperti blockchain untuk pelacakan bahan baku halal, menyebabkan proses menjadi kurang efisien dan rawan celah. Hal ini berdampak pada lambatnya pelayanan serta menurunkan kepercayaan pasar terhadap integritas sistem halal nasional. Namun demikian, tantangan-tantangan tersebut bukanlah hambatan yang tak teratasi. Indonesia menyimpan peluang besar untuk memimpin industri halal global. Salah satu kekuatannya adalah pasar domestik yang sangat luas, yang dapat menjadi dasar konsumsi dan produksi produk halal yang berkelanjutan. Selain itu, ketersediaan bahan baku alami yang berlimpah, seperti hasil pertanian, perikanan, dan rempah-rempah, mendukung pengembangan produk halal dari hulu ke hilir. Tak hanya itu, jaringan pesantren, koperasi syariah, dan pelaku UMKM juga memiliki potensi besar untuk terlibat dalam rantai nilai industri halal. Dengan pendekatan inkubasi dan pendampingan yang tepat, pesantren dan UMKM dapat menjadi produsen sekaligus distributor produk halal, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

Jika pengembangan KIH dilakukan secara sistematis dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara kolaboratif mulai dari pemerintah, pelaku industri, lembaga pendidikan, hingga masyarakat maka bukan hal yang mustahil bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin dalam industrial halal global. Apalagi menurut laporan State of the Global Islamic Economy 2023, pasar halal dunia terus berkembang dan diperkirakan akan mencapai nilai lebih dari 3 triliun dolar AS pada tahun 2025. Ini merupakan peluang strategi yang harus diambil melalui penguatan kawasan industri halal sebagai fondasi ekonomi syariah nasional.

Untuk mengatasi tantangan dalam pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH) dan memaksimalkan potensi Indonesia sebagai Halal Global Hub, berikut beberapa solusi strategi yang dapat diterapkan:

1. Memberikan Insentif Fiskal dan Kemudahan Perizinan kepada Investor di Sektor Halal

Pemerintah perlu menawarkan insentif fiskal seperti pajak yang lebih rendah, subsidi, atau potongan pajak bagi investor yang menanamkan modalnya di sektor industri halal. Di samping itu, proses perizinan juga harus dipermudah, dengan memperkenalkan kebijakan yang transparan dan efisien, serta mengurangi birokrasi yang dapat memperlambat realisasi investasi. Hal ini akan menarik lebih banyak investor, baik domestik maupun internasional, untuk berpartisipasi dalam pengembangan KIH.

2. Menetapkan Kawasan Industri Halal sebagai Zona Ekonomi Khusus (ZEK)

Salah satu langkah strategis untuk menarik lebih banyak investasi asing adalah dengan menetapkan Kawasan Industri Halal sebagai Zona Ekonomi Khusus (ZEK). Dengan status ini, kawasan halal akan mendapatkan berbagai fasilitas dan keistimewaan, seperti pajak yang lebih ringan, kemudahan ekspor-impor, dan akses yang lebih mudah terhadap teknologi terkini. Kebijakan ini dapat meningkatkan daya tarik KIH sebagai pusat produksi halal yang berbasis teknologi dan berfokus pada pasar global.

3. Mendorong Kemitraan Antara Pemerintah, Industri, Perguruan Tinggi, dan Pesantren dalam Riset dan Pengembangan Halal

Pengembangan halal industri membutuhkan sinergi antara sektor-sektor yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk mendorong strategi kemitraan antara pemerintah, pelaku industri, perguruan tinggi, dan pesantren. Perguruan tinggi dapat berpartisipasi dalam mengembangkan inovasi teknologi halal, sementara pesantren, yang memiliki potensi untuk berperan dalam penyuluhan dan pengembangan UMKM halal, dapat menjadi bagian dari ekosistem industri halal. Kolaborasi ini akan memperkuat penelitian dan pengembangan produk halal yang memenuhi standar internasional.

4. Membangun Pusat Riset Halal Nasional Berbasis Teknologi dan Digitalisasi

Proses Sertifikasi Halal Indonesia perlu membangun pusat penelitian halal yang fokus pada penelitian dan pengembangan produk halal serta teknologi terkait, seperti sistem digitalisasi sertifikasi halal. Dengan adanya teknologi terkini seperti blockchain untuk melacak bahan baku dan proses produksi halal secara real-time, proses sertifikasi halal dapat dilakukan dengan lebih cepat, transparan, dan efisien. Pusat penelitian ini akan menjadi tempat pengembangan standar halal internasional dan mendukung inovasi produk halal untuk memenuhi kebutuhan pasar global.

5. Meluncurkan Kampanye Global 'Indonesia Halal Hub' untuk Memperkuat Citra Indonesia di Pasar Internasional

Untuk meningkatkan pengakuan internasional terhadap Indonesia sebagai pusat industri halal, pemerintah perlu meluncurkan kampanye global yang terstruktur dan menyeluruh dengan tema "Indonesia Halal Hub". Kampanye ini akan mencakup promosi produk halal Indonesia melalui pameran internasional, seminar, dan kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional yang berhubungan dengan industri halal. Melalui kampanye ini, citra Indonesia sebagai produsen halal terbesar dan terpercaya dapat semakin menguat di pasar global.

6. Memanfaatkan Platform Digital untuk Pengawasan Rantai Pasok Halal Secara Real-time dan Transparan

Pengawasan terhadap rantai pasok produk halal sangat penting untuk memastikan kualitas dan kehalalan produk dari hulu hingga hilir. Dengan memanfaatkan platform digital berbasis teknologi blockchain, pengawasan terhadap setiap tahapan dalam produksi dan distribusi produk halal dapat dilakukan secara real-time, memberikan transparansi yang lebih besar kepada konsumen dan pemangku kepentingan terkait. Hal ini akan mengurangi risiko penipuan, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan mendukung integritas produk halal Indonesia di pasar internasional.

## **PENUTUP**

Pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH) di Indonesia tidak hanya bertujuan membangun infrastruktur fisik seperti kawasan pabrik atau gudang, melainkan lebih luas dari itu: yakni menciptakan ekosistem halal nasional yang terstruktur, inklusif, dan berdaya saing tinggi. Ekosistem ini harus mampu menyatukan berbagai elemen penting, mulai dari pelaku industri, pemerintah, akademisi, lembaga keuangan syariah, hingga masyarakat umum, agar seluruh proses produksi hingga distribusi berjalan sesuai prinsip syariah. Indonesia memiliki seluruh persyaratan dasar untuk menjadi pemain utama dalam industri halal global. Negara ini memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, pasar domestik yang luas, kekayaan bahan baku halal, serta sistem pendidikan Islam yang kuat. Potensi tersebut harus dimanfaatkan melalui langkah-langkah nyata yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga strategis dan berkelanjutan.

Untuk mengakselerasi pengembangan KIH dan mengukuhkan Indonesia sebagai pusat industri halal global (Posisi Halal Global Hub) , berikut adalah rincian solusi strategi yang dapat dilakukan secara kolaboratif:

1. **Pemberian Insentif dan Regulasi Reformasi**  
Pemerintah perlu memberikan insentif fiskal, seperti pengurangan pajak atau subsidi bagi investor yang menanamkan modal di KIH. Selain itu, proses perizinan usaha harus dipermudah agar pelaku usaha dapat bergerak lebih cepat.
2. **Penetapan KIH sebagai Zona Ekonomi Khusus (ZEK)**  
Dengan status ini, kawasan KIH akan memperoleh perlakuan khusus dalam hal perpajakan, bea masuk, dan akses ekspor-impor yang lebih lancar, sehingga daya tarik bagi investor internasional meningkat secara signifikan.
3. **Penguatan Strategi Sektor Kemitraan**  
Perlu dibangun kemitraan antara pemerintah, industri, perguruan tinggi, dan pesantren agar terjadi sinergi dalam penelitian, inovasi produk halal, dan pengembangan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten di bidang halal.
4. **Pendirian Pusat Riset Halal Nasional**  
Pusat sebuah penelitian berskala nasional perlu dibentuk untuk mengembangkan inovasi produk halal, uji laboratorium, serta digitalisasi sertifikasi dan standar halal berbasis teknologi canggih seperti blockchain dan AI.
5. **Kampanye Global Branding “Indonesia Halal Hub”**  
Perlu ada program kampanye internasional yang diselenggarakan, baik dalam bentuk promosi digital, partisipasi dalam pameran halal dunia, maupun diplomasi halal, untuk memperkuat citra Indonesia sebagai pusat halal yang modern, kredibel, dan terpercaya.
6. **Digitalisasi dan Transparansi Rantai Pasok Halal**  
Penggunaan teknologi digital seperti sistem pelacakan real-time, QR Code, dan platform e-halal perlu ditingkatkan untuk memastikan kehalalan produk sejak dari bahan baku hingga ke tangan konsumen.

Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut secara terstruktur, Indonesia tidak hanya akan meningkatkan kualitas dan daya saing produk halalnya, tetapi juga akan memimpin arah baru industri halal global . Posisi ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan ekspor nasional, tetapi juga akan memperkuat peran Indonesia sebagai motor penggerak ekonomi syariah dunia.

# Kawasan Industri Halal (KIH) Indonesia: Mimpi Besar, Realita Kompleks, dan Jalan Menuju Keunggulan Global

Johan Luthfi Maulana

KSEI LiSEnSi UIN Jakarta

Article Info	ABSTRACT
<p><i>Article history:</i></p> <p>Give Your Opinion (Juli)</p>	<p>Pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH) menjadi langkah strategis Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam industri halal global. Meskipun memiliki pasar domestik yang besar dan peluang ekonomi yang signifikan, implementasi KIH masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya minat investasi, belum terbangunnya ekosistem halal yang terintegrasi, serta lambatnya adopsi teknologi digital dalam sertifikasi dan pengawasan halal. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan pesantren masih belum optimal, sehingga pengembangan riset dan SDM halal belum berkembang maksimal. Melalui strategi seperti peningkatan insentif investasi, integrasi dengan lembaga pendidikan, digitalisasi sistem halal, dan edukasi publik mengenai standar halalan thayyiban, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadikan KIH sebagai pusat keunggulan halal dunia dan motor penggerak ekonomi syariah nasional.</p>
<p><i>Keywords:</i></p> <p><i>Kawasan Industri Halal; Ekonomi Syariah; Investasi Halal; Digitalisasi Halal</i></p>	
<p><i>Editor:</i></p> <p>Zahra Widad Salma Faculty of Economics and Business</p>	

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki peluang strategis untuk menjadi pusat industri halal dunia. Berdasarkan data dari *The State of the Global Islamic Economy Report 2023* (DinarStandard), pengeluaran konsumen Muslim dunia terhadap produk halal mencapai USD 2,29 triliun, dengan sektor makanan dan minuman halal mendominasi sebesar USD 1,27 triliun. Ironisnya, meskipun Indonesia memiliki pangsa pasar besar, peringkatnya dalam Global Islamic Economy Indicator 2023 hanya berada di posisi ke-4, di bawah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Pemerintah telah menginisiasi tiga Kawasan Industri Halal (KIH): Cikande (Banten), Batamindo (Kepulauan Riau), dan Karawang (Jawa Barat). Tujuan utama dari pengembangan ini adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat manufaktur, sertifikasi, distribusi, dan riset halal dunia. Namun, implementasinya belum berjalan optimal. Dari ketiga KIH yang dirancang, hanya sebagian kecil yang benar-benar menarik investor. Menurut data Kemenperin (2024), total investasi di KIH masih berada di bawah Rp 5 triliun, jauh dari target nasional sebesar Rp 20 triliun untuk 2025. Tantangan utama meliputi rendahnya infrastruktur pendukung, keterbatasan sumber daya manusia bersertifikasi halal, serta belum terintegrasinya ekosistem halal secara digital dan logistik. Pertanyaannya kini adalah: apakah KIH sekadar simbol komitmen atau benar-benar akan menjadi motor penggerak ekonomi nasional berbasis syariah?

## PEMBAHASAN

### Kritik dan Analisis Kritis

Pengembangan KIH memiliki semangat besar, namun pelaksanaannya masih menghadapi beberapa tantangan mendasar:

#### 1. Faktor Investasi: Besar di Rencana, Kecil di Realisasi

Meski digembar-gemborkan sebagai *proyek strategis nasional*, KIH belum menarik investor besar dalam jumlah signifikan. Banyak pelaku usaha menganggap biaya sertifikasi halal di Indonesia masih tinggi dan birokratis. Menurut laporan LPPOM MUI (2023), rata-rata proses sertifikasi halal masih memakan waktu 21–30 hari, dengan biaya antara Rp 2 juta hingga Rp 15 juta tergantung skala usaha. Ini menjadi hambatan terutama bagi UMKM halal yang seharusnya menjadi tulang punggung kawasan tersebut.

#### 2. Kurangnya Ekosistem Terpadu

Kawasan Industri Halal seharusnya tidak sekadar menyediakan lahan industri, tetapi menjadi *halal hub* yang menyediakan *end-to-end ecosystem* mulai dari *research and development*, pusat inkubasi halal, pusat logistik, hingga layanan digital halal. Namun, ketiga kawasan belum memiliki pusat riset halal kelas dunia. Bahkan, kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi masih minim. Sebagai contoh, di KIH Batam, belum ada sinergi konkret dengan Universitas atau politeknik terdekat dalam penyediaan SDM bersertifikasi halal.

#### 3. Lambatnya Adaptasi Teknologi Halal dan Digitalisasi

Di era 4.0, teknologi seharusnya menjadi kekuatan utama industri halal. Namun, integrasi blockchain untuk halal traceability, pemanfaatan AI untuk audit halal, maupun penggunaan Internet of Things (IoT) dalam monitoring produksi halal belum diimplementasikan secara serius. Padahal negara seperti UEA dan Malaysia sudah lebih maju dalam aspek ini.

#### 4. Kesadaran Konsumen Masih Terfokus pada Sertifikasi, Bukan Proses

Di Indonesia, paradigma halal masih sempit: sekadar label atau logo. Belum banyak konsumen dan pelaku industri yang memahami pentingnya proses halalan thayyiban secara menyeluruh. Ini berdampak pada lemahnya tekanan pasar domestik terhadap industri untuk masuk ke dalam KIH.

### Solusi Strategis: Jalan Menuju Pusat Industri Halal Dunia

Berikut beberapa solusi dan rekomendasi yang perlu segera diimplementasikan:

#### 1. Insentif Investasi Halal yang Agresif

Pemerintah perlu memberikan *tax holiday* khusus bagi investor yang membangun fasilitas riset halal di dalam KIH, potongan biaya sertifikasi halal untuk pelaku industri yang menetap di KIH, dan pemberian subsidi listrik, air, dan konektivitas untuk KIH selama lima tahun pertama.

#### 2. Integrasi KIH dengan Lembaga Pendidikan Tinggi dan Pesantren

Setiap KIH wajib memiliki mitra akademik minimal satu PTN/PTS dan satu pesantren sebagai laboratorium halal, lalu pendirian *halal innovation center* berbasis kampus di sekitar kawasan.

#### 3. Digitalisasi Sistem KIH

Pembuatan dashboard real-time untuk monitoring aktivitas industri halal dalam satu ekosistem nasional (Halal Industry Monitoring System), Mengadopsi blockchain untuk *halal assurance*, Kemudian menyediakan fasilitas e-sertifikasi yang terintegrasi dengan BPJPH, LPPOM MUI, dan OSS.

#### 4. Kampanye Nasional "Beyond Halal Label"

Edukasi publik tentang pentingnya proses halal, bukan hanya label, melakukan sertifikasi publik bagi pelaku industri dan manajer KIH mengenai standar halal global (misal: SMIIC, GSO, JAKIM). Kemudian, memanfaatkan influencer muslim global dalam mempromosikan produk KIH Indonesia.

#### 5. Mengembangkan KIH Khusus UMKM Halal

Banyak UMKM tidak mampu menyewa lahan di KIH besar. Solusinya, bangun KIH satelit yang khusus bagi UMKM, lengkap dengan inkubator bisnis, layanan keuangan syariah, dan rumah produksi bersama (*halal shared factory*).

## **PENUTUP**

KIH adalah peluang strategis yang tidak boleh gagal. Namun tanpa keberanian dalam membongkar hambatan struktural, birokrasi yang panjang, dan cara pandang sempit terhadap halal, Indonesia akan selalu menjadi *pasar*, bukan *produsen utama* ekonomi halal dunia. Pengembangan kawasan ini harus menasar pada penciptaan nilai tambah, riset, dan integrasi sistem bukan sekadar pembangunan lahan industri. Sebagaimana Malaysia yang menjadikan Halal Park sebagai bagian dari diplomasi ekonominya, Indonesia pun harus menjadikan KIH bukan hanya simbol dalam negeri, tetapi jembatan diplomasi halal global. Dalam konteks ini, KIH bukan sekadar proyek industri, melainkan bagian dari upaya membangun peradaban ekonomi syariah yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

## **REFERENSI**

- DinarStandard. (2023). State of the Global Islamic Economy Report 2023. Dubai: DIEDC. <https://www.dinarstandard.com/post/state-of-the-global-islamic-economy-report-2023>
- Kementerian Perindustrian RI. (2024). Data Perkembangan KIH. Jakarta. <https://kpaii.kemenperin.go.id/id/news/kemenperin-dan-hki-siapkan-lompatan-investasi-melalui-penguatan-regulasi-kawasan-industri>
- LPPOM MUI. (2023). Laporan Tahunan Sertifikasi Halal. <https://halalmui.org/wp-content/uploads/2023/02/Jurnal-Halal-159.pdf>
- World Halal Summit. (2022). Building Competitive Halal Ecosystems in OIC Countries